

ABSTRAK

AINUR MALIK LUBIS, S.H. 2015, Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Februari 2016, **Pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Sumenep**, Dr. M. Amir Hamzah, SH, MH , Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH, MH

Dalam penulisan tesis ini yang menjadi titik berat pembahasan yakni permasalahan Pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Sumenep. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul di Kabupaten Sumenep yakni dalam hal Pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Sumenep yang menyikapi Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya, dengan terbentuknya Peraturan Daerah di Kabupaten Sumenep Nomor 6 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam penulisan ini terdapat tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep dan mengkaji faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

Dalam rangka menganalisa permasalahan untuk menemukan jawaban yang ingin dipecahkan, metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di lokasi yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan diatas yaitu dalam hal pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Daerah kurang aktif dalam mengambil tindakan atas perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta kurang cepat menyelamatkan cagar budaya di Kabupaten Sumenep dan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

Menyikapi hal tersebut, maka bisa diberikan rekomendasi yaitu kepada pihak Pemerintah Daerah agar dengan segera melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang banyak terdapat di Kabupaten Sumenep dengan cara melakukan pencarian terhadap cagar budaya di seluruh Kabupaten Sumenep baik di daerah daratan maupun di kepulauan. Selain itu pula terhadap pihak pemerintah untuk lebih aktif lagi dalam melakukan pendataan dan penyelamatan serta dengan segera dilakukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya agar dapat didaftarkanya cagar budaya tersebut, dengan tujuan untuk lebih menjamin perlindungan hukumnya, serta perlunya peran dari masyarakat untuk mendukung dan mendorong perlindungan terhadap cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

ABSTRACT

AINUR MALIK LUBIS, SH 2015, the Graduate Studies Program of Legal Studies, Faculty of Law, University Trunojoyo Madura February 2016, Implementation of the Protection and Preservation of Cultural Heritage in Sumenep, Dr. M. Amir Hamzah, SH, MH, Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH, MH.

In this thesis that became the focus of the discussion of the problems of the Implementation of the Protection and Preservation of Cultural Heritage in Sumenep regency. This is motivated by the problems that arise in Sumenep namely in terms of implementation of the Protection and Preservation of Cultural Heritage in Sumenep that address local government and community participation in the implementation of the protection and preservation of cultural heritage, with the formation of Regional Regulation in Sumenep Number 6 of 2014 on preservation of Cultural Heritage and the duties and authority in accordance with Regulation Legislation Number 11 of 2010 on Heritage.

In this study, there is a purpose of the author in this study which is to investigate the implementation of the protection and preservation of cultural heritage in Sumenep and examines the factors that hinder the implementation of the protection and preservation of cultural heritage in Sumenep regency. In order to analyze issues in order to find the answer to be solved, the method used is the method of empirical law with the sociological juridical approach is to assess and discuss the problems that obtained in accordance with the facts in a location that is then associated with the legal norms in force and theories of law.

Based on the results of the study, the authors obtained the answers to the above issues, namely in terms of implementation of the protection and preservation of cultural heritage in Sumenep, local governments are less active in taking measures for the protection and preservation of cultural heritage as well as less quickly to save the cultural heritage in Sumenep and their efforts Local Government in the protection and preservation of cultural heritage in Sumenep regency.

In response, it could be given to the recommendation that provincial governments to immediately undertake the protection and preservation of cultural heritage are numerous in Sumenep by doing a search for cultural heritage in all areas of Sumenep regency in both mainland and in the islands. In addition, also on the part of the government to be more active in conducting data collection and rescue and immediately be examined by a team of experts of Cultural Property in order to the registration of cultural heritage, in order to better ensure the protection of the law, as well as the need for the role of the community to support and promote the protection the cultural heritage in Sumenep regency.